

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Samarinda

Periode: Triwulan II (April – Juni 2026)

I. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam aspek kelembagaan, Pemerintah Kota Samarinda juga telah menetapkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 500.12.1/184/HK-KS/IV/2025 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.

BKPSDM Kota Samarinda sebagai salah satu perangkat daerah memiliki kewajiban dalam mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan, pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Informasi yang dikelola antara lain berkaitan dengan kebijakan kepegawaian, pelayanan administrasi kepegawaian, program dan kegiatan, kinerja perangkat daerah, pengembangan kompetensi ASN, serta informasi publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan informasi yang efektif dan sesuai standar, diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tertib serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi, ketersediaan dan keterbaruan informasi publik, pelaksanaan standar layanan informasi, kesiapan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, akurasi, dan kualitas informasi publik di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

II. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

1. Menilai capaian pelayanan informasi publik di Triwulan II.

- 2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam proses pelayanan.
- 3. Menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan berdasarkan data dan temuan.

III. Data Permintaan Informasi

Jenis Layanan	Jumlah Masuk	Status Tindak Lanjut
Permintaan Informasi	16 permintaan	68.75%

IV. Analisis Pelayanan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik pada Triwulan II, tercatat sebanyak 16 permintaan informasi publik yang diterima oleh BKPSDM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68,75% atau 11 permintaan informasi telah ditindaklanjuti, sedangkan 31,25% atau 5 permintaan informasi tidak dapat diberikan karena informasi yang dimohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian tindak lanjut sebesar 68,75% menunjukkan bahwa sebagian besar permintaan informasi publik telah mendapatkan respons dan penanganan dari pengelola layanan informasi. Adapun permintaan yang tidak dapat ditindaklanjuti bukan disebabkan oleh keterlambatan atau kendala pelayanan, melainkan karena substansi informasi yang dimohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, sehingga pemberian informasi kepada pemohon harus dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, pelayanan informasi publik pada Triwulan II telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengecualian informasi. Ke depan, perlu dilakukan penguatan dalam proses identifikasi dan klasifikasi informasi serta dokumentasi terhadap informasi yang dikecualikan. Selain itu, koordinasi antara PPID dengan unit kerja terkait perlu terus ditingkatkan untuk memastikan setiap permintaan informasi dapat diberikan secara tepat apabila informasi tersebut merupakan informasi yang terbuka untuk publik, serta disertai dasar yang jelas apabila permintaan termasuk informasi yang dikecualikan.

V. Temuan dan Tantangan

1. Temuan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik Triwulan II, terdapat 16 permintaan informasi publik yang diterima oleh BKPSDM. Sebanyak 11 permintaan atau 68,75% telah ditindaklanjuti, sedangkan 5 permintaan atau 31,25% tidak dapat diberikan karena informasi yang dimohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah berjalan dengan adanya proses penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut terhadap permintaan informasi. Terhadap permintaan yang termasuk informasi dikecualikan, diperlukan penanganan sesuai prosedur, termasuk memastikan dasar hukum pengecualian dan dokumentasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan informasi publik.

2. Tantangan

Tantangan utama dalam pelayanan informasi publik pada Triwulan II adalah meningkatnya jumlah permintaan informasi dibandingkan dengan Triwulan I, sehingga diperlukan kesiapan pengelola dalam melakukan verifikasi dan memberikan respons secara tepat. Selain itu, masih diperlukan peningkatan pemahaman mengenai klasifikasi informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan, agar keputusan pemberian maupun penolakan informasi dapat dilakukan secara tepat dan konsisten.

Tantangan lainnya adalah memastikan setiap permintaan informasi yang tidak dapat diberikan karena termasuk informasi dikecualikan tetap disertai dasar pengecualian yang jelas, prosedur yang sesuai, serta dokumentasi yang lengkap. Koordinasi antara PPID dan unit kerja pengelola informasi juga perlu diperkuat agar proses verifikasi informasi dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik Triwulan II, rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1. Meningkatkan responsivitas pelayanan informasi publik dengan memastikan setiap permintaan segera diverifikasi, dicatat, dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Memperkuat proses klasifikasi informasi untuk memastikan informasi yang dimohon dapat diidentifikasi secara tepat sebagai informasi terbuka atau informasi yang dikecualikan.
3. Memastikan penolakan terhadap informasi yang dikecualikan memiliki dasar yang jelas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan, apabila diperlukan, melalui mekanisme pengujian konsekuensi.
4. Meningkatkan koordinasi antara PPID dan unit kerja terkait dalam proses pencarian, verifikasi, dan penyediaan informasi agar pelayanan dapat dilakukan secara cepat dan akurat.
5. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala, termasuk melakukan identifikasi terhadap informasi yang berpotensi menjadi informasi dikecualikan.
6. Meningkatkan kualitas pencatatan dan dokumentasi setiap permintaan informasi, termasuk permintaan yang tidak dapat diberikan, beserta alasan dan dasar hukum pengecualiannya.
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelayanan informasi publik untuk mengidentifikasi kendala dan meningkatkan kualitas pelayanan pada triwulan berikutnya, dengan tetap menjaga prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan

terhadap informasi yang dikecualikan.

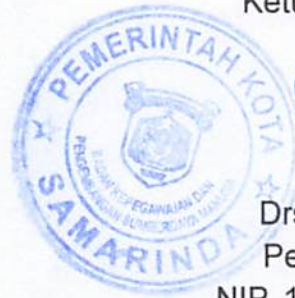
VII. Penutup

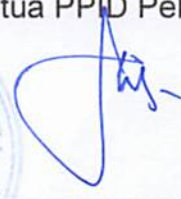
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKPSDM Kota Samarinda ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring, belum terdapat permintaan informasi publik pada periode evaluasi, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, publikasi, aksesibilitas informasi, serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik agar keberadaan layanan informasi publik lebih dikenal dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda. Dengan pengelolaan yang lebih tertib, transparan, akurat, dan mudah diakses, diharapkan pelayanan informasi publik dapat terus ditingkatkan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Samarinda, 13 Juli 2026

Ketua PPID Pelaksana,




Drs. SIAMI MISNAM,
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196812121988031010

LAMPIRAN

REKAP BULAN APRIL 2026

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BULAN APRIL 2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

No.	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan penggunaan informasi (penelitian, skripsi/tesis/disertasi, pengawasan publik, dll)	Keputusan		Alasan Penolakan
						Diterima	Ditolak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	20 Apr 2026	Sekda kota samarinda	Sekda kota samarinda	Surat Permintaan data jumlah ASN.	Kepegawaian	√		-
2.	27 Apr 2026	Kecamatan Samarinda Ulu	Kecamatan Samarinda Ulu	Permintaan Data Pegawai untuk Pengisian Box Talenta Kelurahan Air Putih.	Manajemen Talenta		√	Data box talenta diberikan langsung kepada yang bersangkutan
3.	26 Apr 2026	Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda	Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda	Permintaan Data Pegawai untuk Pengisian Box Talenta Kelurahan Air Putih.	Manajemen talenta		√	Data box talenta diberikan langsung kepada yang bersangkutan

4.	8 Apr 2026	Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII	Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII	Permohonan Data PPPK yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa.	Manajemen Aparatur		√	Terkait informasi pribadi yang dikecualikan
5.	27 Apr 2026	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Data Kebijakan WFH	Kebijakan WFH Pemerintah Kota Samarinda	√		-

Samarinda, 4 Mei 2026
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,


SAMSAIMUN R, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197310072008011014

REKAP BULAN MEI 2026

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BULAN MEI 2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

No.	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan penggunaan informasi (penelitian, skripsi/tesis/disertasi, pengawasan publik, dll)	Keputusan		Alasan Penolakan
						Diterima	Ditolak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	6 Mei 2026	Renalt Febryano Rahadi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Mulawarman	Penelitian dan Permintaan Data Tesis	Tesis	√		-
2.	11 Mei 2026	KEMENDAGRI RI	KEMENDAGRI RI	Surat Permintaan data jumlah ASN	Kepegawaian	√		-
3.	21 Mei 2026	BankKaltimtara	BankKaltimtara	Permohonan Data PNS dan PPPK Periode Tahun 2026	Kepegawaian	√		-
4.	22 Mei 2026	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Data pegawai yang memiliki ijazah tetapi tidak mempunyai	Berkas Keterangan Izin Belajar	√		-

				surat izin usulan mei 2026				
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Samarinda, 8 Juni 2026
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,


SAMSAIMUN R, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197310072008011014

REKAP BULAN JUNI 2026

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BULAN JUNI 2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

No.	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan penggunaan informasi (penelitian, skripsi/tesis/disertasi, pengawasan publik, dll)	Keputusan		Alasan Penolakan
						Diterima	Ditolak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4 Jun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	Permintaan Data Kajian	RPJMD	√		-
2.	3 Jun 2026	INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA	INSPEKTORAT KOTA SAMARINDA	Permintaan Data PNS	Kepegawaian	√		-
3.	10 Jun 2026	Alwan Nabil Alvares	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Mulawarman	Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data	Penelitian	√		-
4.	4 Jun 2026	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permohonan Data Box Talenta PNS DPPKB Kota	Manajemen Talenta		√	Langsun diberikan kepada individu yang bersangkutan

				Samarinda.				
5.	17 Jun 2026	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Inventarisasi data kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Samarinda	Aset	√		
6.	29 Jun 2026	LAN RI	LAN RI	Permohonan Data P3K di wilayah Kalimantan	Kepegawaian	√		
7.	30 Jun 2026	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Permohonan Data Box Talenta			√	Langsun diberikan kepada individu yang bersangkutan

Samarinda, 6 Juli 2026
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,


SAMSAIMUN R, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197310072008011014